

# **LAPORAN AKHIR**

## **PARADIGMA INTERPRETIF KRITIS: PENGEMBANGAN MODEL *ISLAMIC GOVERNANCE* DALAM MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH**

**Peneliti**

**Dr. Leny Nofianti, SE. M.Si, AK, CA**

**Dr. Julina, SE. MM**

**Diana Eravia, SE. M.Si**

**PEKANBARU**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah dengan rahmat dan inayah-Nya laporan penelitian yang berjudul “**PARADIGMA INTERPRETIF KRITIS: PENGEMBANGAN MODEL *ISLAMIC GOVERNANCE* DALAM MENILAI KINERJA PERBANKAN SYARIAH**” ini dapat diselesaikan.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti banyak mendapat bantuan dari para narasumber sebagai key informan, yaitu Bapak Prof.Iwan Triwiyono dari Universitas Brawijaya sebagai pakar akuntansi syariah, Ibu Murniati Mukhlisin Phd, Ketua STEI Tazkia sebagai pakar ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta Bapak Sofyan, M.Ag sebagai pakar ke-Islaman dan syariah, serta pihak perbankan syariah di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru dan para nasabah bank syariah di Kota Pekanbaru. Atas kesediaan mereka meluangkan waktu untuk dilakukan wawancara (bagi narasumber) dan mengisi angket secara jujur dalam pengambilan data (bagi karyawan bank syariah dan nasabah), untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih. Terkhusus kepada UIN Suska Riau melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UIN Suska Riau beserta staf, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

Terakhir kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu diucapkan terima kasih yang setulus tulusnya.

Pekanbaru, Desember 2018

Wassalam,

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | i   |
| KATA PENGANTAR.....  | ii  |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| DAFTAR TABEL.....  | v   |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2. Rumusan Masalah.....  | 5   |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....   | 6   |
| 1.4. Manfaat dan Kontribusi Penelitian .....                                 | 6   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 8   |
| 2.1. <i>Governance Theory</i> ... ..   | 8   |
| 2.2. Prinsip Governance Konvensional .....                                   | 10  |
| 2.3. Governance Syariah/Islamic Governance .....                             | 14  |
| 2.4. <a href="#"><u>Kinerja Lembaga keuangan Perbankan Syariah</u></a> ..... | 16  |
| 2.5. Penelitian Terkait.....   | 18  |
| 2.6. Rerangka Berfikir .....   | 23  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 25  |
| 3.1. Jenis Penelitian .....  | 25  |
| 3.2. Tahapan Penelitian .....  | 27  |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data .....   | 28  |
| 3.4. Validasi Data .....   | 28  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                  | 31  |
| 4.1 Hasil Penelitian .....   | 31  |

|  |    |
|--|----|
| 4.1.1 Framework Pembangunan Teori Dasar Indikator <a href="#">Islamic Governance</a> | 31 |
| 4.1.2. <a href="#">Hasil Wawancara dengan Pakar</a>                                  | 36 |
| 4.1.3. Hasil Uji Analisis Faktor   | 42 |
| 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian   | 62 |
| BAB V PENUTUP  | 69 |
| 5.1 Kesimpulan   | 69 |
| 5.2 Saran  | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |
| LAMPIRAN   |    |
| BIODATA PENELITI   |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.LatarBelakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan perbankan syariah sampai akhir tahun 2016 mencapai 19,67persen. Sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12 persen, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia.(Republika, 2017).

ISEFID (*Islamic Economic Forum for Indonesian Development*) melakukan kajian bahwa perbankan syariah pada 2017 harus terus berbenah dan memperbaiki kualitas layanan dan jaringan. Hal ini karena masih terdapat ketimpangan yang lebar dalam perbankan syariah mulai dari sebaran aset, sebaran pembiayaan, dan sebaran dana pihak ketiga (DPK). Walaupun demikian, ISEFID optimis perkembangan perbankan syariah akan semakin membaik di 2017. Terdapat kecenderungan peningkatan portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS) yang mendekati angka 40 persen, sedangkan kredit macetnya (NPF) juga semakin rendah, di bawah 4 persen.(Ali Sakti, 2017)

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran gerakan renaissance Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis (Saeed, Abdullah, 1996). Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bank Syariah memiliki peranan besar dalam menjalankan fungsi intermediasi, hal ini terlihat dari peningkatan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ketahun dibandingkan perbankan umum.Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang terbit pada 19 September 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan bank umum syariah buku 3 mampu tumbuh cukup subur 10,80% dari Rp 52,05 triliun per Juli 2016 menjadi Rp 57,67 triliun per Juli 2017. Dana pihak ketiga (DPK) pun tumbuh 11,86% dari Rp 65,84 triliun menjadi Rp 73,65 triliun pada periode yang sama. Pertumbuhan

demikian telah mendorong financing to deposit ratio (FDR) naik sedikit dari 79,05% menjadi 79,31%. FDR itu jauh lebih rendah dari pada loan to deposit ratio (LDR) bank umum konvensional buku 3 sebesar 89,20% pada periode yang sama. Artinya, kemampuan mengemban fungsinya sebagai intermediasi keuangan kian baik karena masuk FDR ideal 78%-92%.(OJK, 2017)

Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syariah merupakan hal tidak mustahil, meskipun di situ ada Dewan Pengawas Syariah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syariah semakin banyak, maka para bankir syariah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci" , karena berasal dari prinsip ilahiyah. Untuk itu perlu penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan syariah menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan GCG dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*

Mewujudkan tata kelola yang baik pada setiap organisasi baik organisasi yang berorientasi laba maupun organisasi yang tidak berorientasi laba memerlukan waktu yang tidak singkat dan upaya yang berkesinambungan. Fenomena tentang pelaksanaan tata kelola mulai dikenal dengan *good corporate governance* dimana kasus terbesar yang memicu adanya tuntutan *good corporate governance* terjadi

disebabkan oleh runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di AS serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia.

Krisis moneter yang menghantam perekonomian dunia khususnya negaranegara Asia menjelang akhir tahun 1990-an dan 2008 (Uddin; 2015), melahirkan inisiatif dalam menguatkan rerangka tata kelola perusahaan dalam lingkup nasional maupun regional. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi bahwa penyumbang utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata kelola perusahaan” (Zhuang, et al, 2000). Dengan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia.

GCG menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kebangkrutan perusahaan. Beberapa penelitian berusaha mendukung usaha tersebut. Hasil penelitian mengenai hubungan antara CG dan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian meta-analisis oleh Wagner, Stimpert, & Fubara (1998) menunjukkan bahwa peningkatan komposisi dewan komisaris eksternal dan internal memengaruhi kinerja perusahaan di US. Sementara, meta-analisis yang dilakukan oleh Dalton et al., (1998) menunjukkan bahwa komposisi komisaris, struktur kepemimpinan, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi kinerja perusahaan di US

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good corporate Governance* Bagi Bank Umum Nomor:8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006) mengatakan bahwa: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penelitian IICD dengan *self assessment* dengan 20 (dua puluh) kriteria yaitu: komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, Visi Misi, kerja sama/kolaborasi, strategi, etika, budaya, risiko, kapabilitas organisasi, iklim etika, budaya risiko, manajemen pengetahuan, organisasi pembelajar, penciptaan nilai menunjukkan pada tahun 2014 terdapat rata-rata nilai tata kelola perusahaan diatas 82,66 poin dari 12 kriteria yang dinilai dan berarti bahwa tata kelola perusahaan public di Indonesia sudah cukup baik (Laporan

CGPI; 2014), kontradiksi dengan pernyataan Ketua Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) yaitu saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara (Okezone; 2017).

Konsep *corporate governance* merupakan konsep universal yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan seluruh *stakeholders* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban. Pandangan ekonomi, meningkatkan kemampuan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas keuangan, hal ini semua menjadi fokus utama dari *corporate governance* (Varma, 2004). Konsep yang diukur dengan kriteria dan indikator yang telah dikembangkan sebelumnya terlihat sangat mengutamakan hanya berorientasi materialistik dengan melihat keuntungan karena kinerja keuangan itu dilihat besar-kecilnya keuntungan yang dihasilkan dan ini bertentangan dengan pandangan Islam dimana Islam merupakan agama yang datang sebagai pemberi pencerahan dan agama yang *rahmatan lil'alam*.

Mahmoud (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip tata kelola (*governance*) perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) yang konvensional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam *corporate governance* memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan peran dan tanggung jawab, dimana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam, tetapi masih menerapkan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

Menurut Algoud dan Lewis (1999) permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah (*syari'ah compliance*) (Algoud dan Lewis, 1999), kemungkinan terjadinya asimetri informasi sangat tinggi bagi perbankan syariah (Archer dan Kariim, 1997), dan karena perbankan syariah sebaiknya menjadi karakter inheren berupa etika bisnis yang Islami (Sigit Pramono, 2002).



GCG pun seharusnya mempertimbangkan kelengkapan unsur manusia. Penelitian yang telah mencoba membangun dari “dalam” CG pernah dilakukan oleh Toha (2011) yang merumuskan lima prinsip dalam *Shari'a* CG 8 yaitu *shaleh*, *kaffah*, *istiqamah*, *amanah*, dan *falah*. Toha menjelaskan bahwa *keshalehan* merupakan unsur utama dan pertama yang harus dimiliki oleh insan. *Keshalehan* ini mendorong insan untuk bertindak secara *kaffah*, *istiqamah*, *amanah* dan menciptakan kemakmuran (*falah*). *Kaffah* dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi perbankan. Setiap laku SDI dilakukan secara *istiqamah* dalam memegang amanah sehingga tercipta kemakmuran masyarakat (*falah*). Konsep Toha ini memfokuskan pada karakter insan yang ditelaah dari “dalam”. Namun demikian, bangunan rerangka konseptual masih memerlukan elemen lainnya yang harus mempunyai kesatuan arah dengan tujuan, asumsi, dan kendala supaya dapat diterapkan. Dengan demikian, elemen rerangka konseptual haruslah utuh supaya mendapatkan keselarasan dan kemudahan implementasi.

Nofianti, dkk (2012) menggali prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) *Syariah* dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafahul Ryashidin. Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia, ada beberapa prinsip yang dianggap penting bagi peneliti dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah*. Untuk menerapkan Islamic Governance pada perbankan syariah, tidak cukup hanya dengan prinsip *governance* yang dikemukakan untuk bank konvensional. Ada beberapa prinsip yang harus melekat pada usaha syariah.

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk membangun sebuah konstruksi *Islamic Governance* yang ideal bagi perbankan syariah berdasarkan pendekatan Paradigma Interpretif kritis dan nantinya akan diuji langsung pada perbankan-perbankan syariah yang ada di Indonesia.. Diharapkan penelitian ini akan dapat menemukan model Islamic Governance yang ideal dalam menilai kinerja perbankan syariah.

## **1.2.Rumusan masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kontruksi Governance yang sesuai dengan Islamic Governance
2. Apakah model *Islamic Governance* yang dikembangkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah

### **1.3.TujuanPenelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkonstruksi Governance yang sesuai dengan Islamic Governance
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model *Islamic Governance* yang dikembangkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah

### **1.4.Manfaat dan Kontribusi Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu
  - Manfaat teoritis dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam ilmu akuntansi syariah dan perbankan syariah terutama dalam mengkonstruksi *Islamic Governance* untuk mengukur kinerja perbankan syariah
  - Bagi pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi referensi bidang Ekonomi Islam khususnya Akuntansi Syariah dan perbankan syariah dalam mengelola perbankan syariah.
- b. Manfaat Operasional
  - Penelitian ini mengkonstruksi sebuah model baru yang ideal dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dari tata kelola (*governance*) yang Islami.
  - Model ini dapat mengurangi resiko manajemen dan membantu melakukan tindakan perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola perbankan syariah yang baik (*Good Islamic Governance*).

- Secara prakteknya, penelitian ini dapat dijadikan *tools* bagi pemerintah terutama OJK dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip Islami. Hal ini tentunya akan memicu setiap perbankan syariah di Indonesia untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kinerja perbankannya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembiayaan yang baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. *Governance Theory*

Teori *Governance* dikemukakan oleh Stoker (1998) dalam *International Social Science Journal* dengan judul “*Governance as Theory: Five Propositions.*”. Stoker (1998) mengemukakan bahwa :

*Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government...,Governance for (some) is about the potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance, ...is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p. 17-18).*

Menurut Stoker (1998) *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan, yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah, *governance* merupakan bentuk baru dari peraturan menuju *New Public Management* (NPM). *Governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Peters dan Pierre (1998) yang mengatakan bahwa *governance* adalah proses, sementara *New Public Management* (NPM) adalah hasil. Stoker (1998) mengemukakan lima proposisi untuk merumuskan pemahaman tentang isu-isu kritis bahwa teori *governance* akan membantu menjawab masalah krusial, yaitu:

1. *Governance refers to institutions and actors from within and beyond government. (But there is a divorce between the complex reality of decision-*

*making associated with governance and the normative codes used to explain and justify government).*

2. *Governance identifies the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues. This shift in responsibility goes beyond the public-private dimension to include notions of communitarianism and social capital. (However, blurring of responsibilities can lead to blame avoidance or scapegoating).*
3. *Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions involved in collective action.*
4. *Governance is about autonomous self-governing networks of actors. (The emergence of self-governing networks raises difficulties over accountability).*
5. *Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to command or use its authority. (But even so, government failures may occur.)*

Dilema pengelolaan dalam konteks ini adalah bahwa ada masalah besar dengan resiko yang sangat nyata atas kegagalan kepemimpinan, perbedaan antara mitra kunci dalam jadwal dan prioritas tujuan dan konflik sosial, yang dapat menyebabkan kegagalan pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam desain institusi publik dapat diatasi sebagian oleh ketokohan, kepekaan terhadap kompleksitas, motivasi, keragaman dan keikutsertaan masyarakat (Stoker, 1998).

Menurut Grant (2003), *Corporate governance* adalah suatu teori yang luas serta bertalian dengan keselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan para pemegang kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Hermanson and Larry (2003), pengertian *corporate governance* yang diberikan oleh *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, developed a broader definition (199:1):

*Corporate governance ... involves a set relationship between a company's management, its shareholders, and other stake holders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interest of the company and share holders and should facilitate effective monitoring*

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian *corporate governance* cukup luas karena mencakup hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemiliknya

dan para pemilik kepentingan lainnya, dan juga mengemukakan tentang keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik, insentif, pemantauan dan pengendalian.

Menurut Hermanson and Larry (2003), *corporate* atau *organizational government* adalah suatu konsep yang luas dan yang telah digunakan oleh: *regulators, investors, accountants*, dan *board of directors*. Dan pihak-pihak yang terlibat langsung *organizational governance*, menurut Hermanson and Larry (2003), adalah manajemen dengan *internal auditors, audit committees, regulators* dan *law enforcement*. Sedangkan *independent public accountants* adalah pihak yang terlibat tidak langsung dalam *organizational government* dengan manajemen, tetapi terlibat langsung dengan *audit committees*. Dalam *organizational governance* meliputi: pihak-pihak yang terlibat, aktivitasnya, tujuan atau sasarannya dan pertanggungjawabannya.

Sedangkan menurut *The Forum for Corporate Governance* di Indonesia (FCGI) kegunaan dari GCG (Sukrisno Agoes, 2005) adalah: (a) lebih mudah memperoleh modal; (b) biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah; (c) memperbaiki kinerja usaha; (d) mempengaruhi harga saham; (e) memperbaiki kinerja ekonomi.

Di Indonesia, bank syariah untuk menerapkan GCG selain membutuhkan dewan komisaris dan komite audit, juga harus terdapat dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini merupakan pihak luar perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari internal perusahaan yang diangkat dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional.

## **2.2. Prinsip Governance Konvensional**

Pengertian *corporate governance* menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti OECD atau negara-negara maju dalam tatanan *common law system*, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan.

Organization for economic cooperation and development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistem dimana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol.

*“Corporate governance is the system by which business cooperation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the rights and responsibilities among different participants in the cooperation such as the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which company objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance”*(OECD, April 1999, h.2)

Maka dari pengertian diatas menurut OECD secara umum ada empat prinsip utama dalam penerapan corporate governance sehingga pengawasan dapat berjalan baik yaitu :

1. Fainess, yaitu perlakuan yang seimbang anatar pemegang saham, manajemen, stake holder lainnya.
2. Tranparansi , yaitu pengungkapan informasi dan laporan keuangan, kinerja perusahaan dan informasi-informasi lainnya mengenai perusahaan yang relevan, akurat dan tepat waktu
3. Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor
4. Tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab sosial perusahaan sebagai anggota masyarakat terhadap masyarakat meliputi tanggung jawab pematuhan hukum dan pengakuan kebutuhan sosial masyarakat.

Secara yuridis prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan Unit Usaha Syari'ah) UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu bank syari'ah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi

nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah. (Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, pasal 34, 35, 38 dan 39)

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Nomor:8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006) mengatakan bahwa: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip ini sama dengan prinsip yang dikemukakan *OECD* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Independensi, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

*Finance Committee on Corporate Governance* Malaysia mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporat governance* namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai.

Prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh OECD adalah mencakup hal-hal yaitu landasan hukum, hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan



perusahaan, perlakuan adil terhadap pemilik saham, peranan *stakeholder* dalam penerapan GCG, prinsip transparansi dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan dan tanggungjawab manajemen perusahaan.

Menurut Chapra dan Ahmad (2002), GCG lebih dari sebuah hubungan antara manajemen dan shareholder juga stakeholdernya melainkan sebuah tujuan untuk mencapai fairness bagi semua stakeholder yang akan didapat dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Cadbury Comittee mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Secara formal corporate governance juga didefinisikan sebagai sistem hak, proses, control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakeholders.

Sedangkan IICG (Indonesian Institute for corporate Governace) mendefinisikan corporate governance merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Stakeholder lainnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu kreditor, pemasok, pelanggan pegawai, pemerintah dan masyarakat.

Blair (1995) dan Gelauff (1997) menyimpulkan bahwa stakeholder dalam korporasi adalah pemegang saham, dewan direksi, manajer, karyawan, konsumen, pemasok, dan pesaing. Untuk itu Corporate Governance menjelaskan hubungan antara pemasok modal dan peminjam dana kepada perusahaan beserta manajemennya.

Dari pengertian di atas, maka prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut

berperan dan memberikan suara dalam RUPS,(5)memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan. Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
4. Keterbukaan dan Transparansi Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*) Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
6. Tanggung Jawab Dewan Pengurus

### **2.3. Governance Syariah/Islamic Governance**

Sistem tata kelola yang dimaksud adalah sistem tata kelola syari'ah atau biasa disebut dengan istilah *shariah goveranance* (SG) bagi lembaga keuangan syari'ah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari'ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari'ah. Salah satu elemen penting dari sistem

tersebut adalah keberadaan dewan syari'ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan (Isra, 2010:106).

Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syari'ah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syari'ah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah tata kelola syari'ah atau *shariah governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) sebagai bentuk sistem tata kelola bagi lembaga keuangan syari'ah.

Tata kelola syari'ah menurut IFSB ialah “Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syari'ah melalui proses penerbitan fatwa syari'ah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syari'ah. Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syari'ah dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syari'ah dan Internal Audit; (2) pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syari'ah; dan (3) proses review terhadap pemenuhan syari'ah (IFSB, 2009:138) .

Hassan dkk (2013) dengan membagi aspek tata kelola syari'ah menjadi 4 (empat) aspek utama, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syari'ah. Adapun kerangka regulasi tata kelola syari'ah tersebut dapat dijabarkan (Hassan, Dkk).

Aspek regulasi berusaha untuk melihat bagaimana kerangka hukum pengaturan sistem tata kelola syari'ah. Apakah diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yang terpisah dari konvensional dan juga apakah diatur dalam bentuk peraturan dan *guideline*.

Sistem tata kelola syari'ah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Konsep teknis dan operasionalnya selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Sistem tata kelola syari'ah diatur dalam bentuk undang-undang dan *guideline* yang dikeluarkan.

Di Indonesia, sistem tata kelola syari'ah berdasarkan UU No. 21/2008 menempatkan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) sebagai pihak penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syari'ah di internal perbankan syari'ah. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan LKS agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Selanjutnya pada level nasional, ada lembaga bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Meskipun UU Perbankan Syari'ah tidak memberikan penjelasan yang rinci namun dijelaskan lewat PBI ini secara umum menjelaskan tentang konsep GCG serta bagaimana peran masing-masing dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syari'ah. Dalam PBI ini juga dijelaskan tentang format *self assessment* pelaksanaan GCG pada bank syari'ah.

Pada bagian pengawasan syari'ah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan anggota DPS, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan hasil pengawasan DPS dan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun *guidelines* ini cukup menyeluruh tapi belum bisa disebut sebagai model kerangka SG yang menyeluruh bagi LKS. Format *guidelines* GCG ini cenderung hasil penyesuaian dengan *guidelines* GCG bagi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Bedanya hanya terletak pada keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi perusahaan (Ali Rama, 2016:7).

#### **2.4. Kinerja Lembaga Keuangan Perbankan Syariah**

Pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Dari aspek keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan sering menjadi perhatian utama bagi para pemakai informasi laporan keuangan. Sedangkan dari aspek non-keuangan bisa dilihat dari kepuasan nasabah ataupun pekerja, dan juga bisa dilihat dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan dan lain sebagainya.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pada bank adalah melalui tingkat kesehatannya. Untuk bank syariah telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jika dibanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syaria'ah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syaria'ah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syaria'ah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syaria'ah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syaria'ah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional.

Keharusan tampilnya bankir syaria'ah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (2009) karena permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. *Pertama*, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. *Kedua*, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi

sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah (Archer dan Karim, 1997). *Ketiga*, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah (Sigit Pramono, 2002).

Menurut Beikos dan Cyprus dalam Rindaasyuti (2000) disamping bank syariah menghadapi risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional karena pertama, sebagian besar pembiayaan di bank syariah adalah bagi hasil dimana pendapatan bank dari bagi hasil ini memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Kedua, bank syariah menanggung risiko likuiditas yang lebih besar karena sejumlah asetnya adalah bentuk asset non likuid. Ketiga bank syariah lebih terekspos pada risiko perubahan fiscal dan moneter karena penerapan pembiayaan bagi hasil kepada nasabahnya, keempat bank syariah mempunyai risiko lebih besar pada resiko nilai tukar karena dilarang melakukan hedging.

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (*asset variable*), risiko pasar (risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risikolikuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna meningkatkan kinerja bank syariah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penerapan *good corporate governance*. Risiko di Perbankan Syariah adalah sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pelaksanaan corporate governance di bank syariah.

## **2.4. Penelitian Terkait**

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good corporate Governance* Bagi Bank Umum Nomor: 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006) mengatakan bahwa: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penelitian IICD dengan *self assessment* dengan 20 (dua puluh) kriteria yaitu: komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, Visi Misi, kerja sama/kolaborasi, strategi, etika, budaya, risiko, kapabilitas organisasi, iklim etika, budaya risiko, manajemen pengetahuan, organisasi pembelajar, penciptaan nilai menunjukkan pada tahun 2014 terdapat rata-rata nilai tata kelola perusahaan diatas 82,66 poin dari 12 kriteria yang dinilai dan berarti bahwa tata kelola perusahaan public di Indonesia sudah cukup baik (Laporan CGPI; 2014), kontradiksi dengan pernyataan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI) yaitu saat ini Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara (Okezone; 2017).

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut *Overseas Economic Corporation and Development (OECD)* mencakup 5 (lima) aspek dasar yang meliputi: [1] Hak pemegang saham, [2] Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, [3] Peran para pemegang kepentingan, [4] Pengungkapan dan transparansi, [5] Tanggung jawab direksi dan komisaris. Semakin berkembang aktivitas seluruh organisasi bisnis maupun non bisnis menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik *good corporate governance* dalam pengelolaan organisasi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder.

Stoker (1998) menyatakan bahwa *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan dengan batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah, *governance* merupakan bentuk baru dari peraturan menuju *New Public Management (NPM)*. *Governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Cornelius (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai *sterwardship responsibility* perusahaan untuk memberikan pengawasan atas sasaran dan strategi perusahaan dan untuk mendorong penerapannya.

Penerapan ini didukung oleh sistem tata kelola perusahaan yang baik meliputi lembaga-lembaga formal dan informal, hukum, nilai-nilai, dan aturan yang menghasilkan produk hukum yang pada gilirannya menentukan distribusi kekuasaan dengan tujuan untuk keputusan manajerial (Cornelius and Kogut; 2003). Hermanson dan Larry (2003), *corporate* atau *organizational governance* adalah suatu konsep yang luas dan yang telah digunakan oleh regulator, investor, akuntan, dan dewan direksi serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam *organizational governance* adalah manajemen dengan *internal auditors*, *audit committees*, *regulators* dan *law enforcement*. Dalam *organizational governance* meliputi: pihak-pihak yang terlibat, aktivitasnya, tujuan atau sasarannya dan pertanggungjawabannya. Dengan kata lain untuk melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* diatas, tentunya harus didukung oleh organ-organ perusahaan dan non perusahaan yang terlibat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dicerminkan oleh laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat memenuhi fungsinya, maka manajemen perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* perusahaan yang baik. Oleh sebab itu pada saat ini *GCG* menjadi suatu alat untuk mencegah manajemen perusahaan melakukan *fraud* terhadap laporan keuangan perusahaannya, sehingga laporan keuangan tersebut relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pemakainya. Beberapa tahun terakhir ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam indikator kuantitatif tentang tata kelola (*governance*). Bahkan, indikator-indikator ini telah menjadi industri pertumbuhan itu sendiri. Estimasi berbeda dalam menilai tata kelola bagi setiap lembaga dan Negara baik yang dikembangkan oleh organisasi internasional, lembaga penelitian dan organisasi swasta. Pertumbuhan fenomenal indikator pemerintahan sebagian didorong oleh meningkatnya permintaan indikator oleh para peneliti dan pembuat kebijakan dan berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan swasta.

Konsep *corporate governance* merupakan konsep universal yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan seluruh *stakeholders* lainnya sehubungan dengan



hak-hak dan kewajiban. Pandangan ekonomi, meningkatkan kemampuan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas keuangan, hal ini semua menjadi fokus utama dari *corporate governance* (Varma, 2004). Konsep yang diukur dengan kriteria dan indikator yang telah dikembangkan sebelumnya terlihat sangat mengutamakan hanya berorientasi materialistik dengan melihat keuntungan karena kinerja keuangan itu dilihat besar-kecilnya keuntungan yang dihasilkan dan ini bertentangan dengan pandangan Islam dimana Islam merupakan agama yang datang sebagai pemberi pencerahan dan agama yang *rahmatan lil' alamin*. Mahmoud (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip tata kelola perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD yang konvensional. Mahmoud (2009) menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam *corporate governance* memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan oleh peran dan tanggung jawab, di mana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum *illahi* Islam, sedangkan penerapan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

GCG pun seharusnya mempertimbangkan kelengkapan unsur manusia. Penelitian yang telah mencoba membangun dari “dalam” CG pernah dilakukan oleh Toha (2011) yang merumuskan lima prinsip dalam *Shari'a* CG 8 yaitu *shaleh*, *kaffah*, *istiqamah*, *amanah*, dan *falah*. Toha menjelaskan bahwa *keshalehan* merupakan unsur utama dan pertama yang harus dimiliki oleh insan. *Keshalehan* ini mendorong insan untuk bertindak secara *kaffah*, *istiqamah*, amanah dan menciptakan kemakmuran (*falah*). *Kaffah* dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi perbankan. Setiap laku SDI dilakukan secara *istiqamah* dalam memegang amanah sehingga tercipta kemakmuran masyarakat (*falah*). Konsep Toha ini memfokuskan pada karakter insan yang ditelaah dari “dalam”. Namun demikian, bangunan rerangka konseptual masih memerlukan elemen lainnya yang harus mempunyai kesatuan arah dengan tujuan, asumsi, dan kendala supaya dapat diterapkan. Dengan demikian, elemen rerangka konseptual haruslah utuh supaya mendapatkan keselarasan dan kemudahan implementasi.

Selain itu, menelaah unsur “dalam” diri manusia, secara tidak langsung bersinggungan dengan ilmu kejiwaan, dalam hal ini adalah psikologi. Osterloh et al., (2011), menyarankan penggunaan psikologi dalam menyusun rerangka konseptual GCG. Hal ini karena Osterloh, Frey, & Zeitoun (2011) menyadari bahwa dorongan internal dalam diri pelaku CG ikut menentukan keberhasilan GCG. Hanya saja, penelitian ini masih sebatas saran penggunaan psikologi dalam penyusunan GCG. Senada dengan hal tersebut, Casey (2002: 8) menyatakan bahwa organisasi dan manajemen sangat berkaitan dengan psikologi perilaku yang mempelajari tingkah laku individu dalam organisasi. Dengan demikian belum terdapat penelitian mengenai konsep GCG yang menyeluruh sebagai dasar penerapan perusahaan dalam beraktivitas.

Konsep GCG yang melibatkan unsur manusia secara utuh lebih banyak mendapatkan perhatian. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Kasim et al., (2013a) membandingkan rerangka konseptual yang disusun oleh AAOIFI, IFSB, dan Bank Negara Malaysia (BNM). Secara umum, mereka menekankan pada pentingnya keberadaan DPS untuk menjamin konsistensi kepatuhan perusahaan berdasarkan aturan syariah. Untuk mencapainya, dilakukan internal review secara berkala oleh internal auditor dan dilaporkan kepada DPS. Selain itu, untuk menerapkan GCG, prinsip yang dimiliki oleh jajaran CG antara lain: beriman, *trustworthiness*, independen, objektif, berkompeten (memahami proses bisnis syariah), transparan, responsibel, dan akuntabel. Sayangnya dari ketiga lembaga tersebut, belum menjelaskan definisi dari *shari'a corporate governance* (SGC), belum mendiskusikan kendala manajemen syariah, dan fungsi pengembangan.

Dalam penelitian lainnya, Kasim et al., (2013b) menyarankan untuk mengintegrasikan konsep CG konvensional pada *shari'a governance* untuk pasar modal *shari'a*. Rerangka konseptual yang ditawarkan menekankan pada peran dewan pengawas syariah (DPS) dengan karakteristik berupa: independensi, *confidentiality-consistency*, dan berkompeten. Sedangkan prinsip CG yang harus diterapkan adalah akuntabilitas, independensi, kompetensi, dan transparansi.

Penelitian Toha (2011), rerangka konseptual tersebut masih terbatas pada karakteristik insan dan prinsip GCG, karenanya belum memberikan dasar yang utuh bagi bangunan rerangka konseptual yang seharusnya memiliki tujuan, asumsi, dan filosofi yang melandasi SCG. Selain itu, Lukviarman (2016: 236) menjelaskan bahwa tantangan bagi perusahaan saat ini menuntut penguatan dalam rerangka konseptual CG yang mampu merefleksikan realitas lingkungan bisnis, perpaduan adaptasi terhadap *legal system* dan *culture* di setiap negara. Unsur moralitas dari sisi manusiawi pelaku CG perlu mendapatkan perhatian khusus dalam membangun SCG.

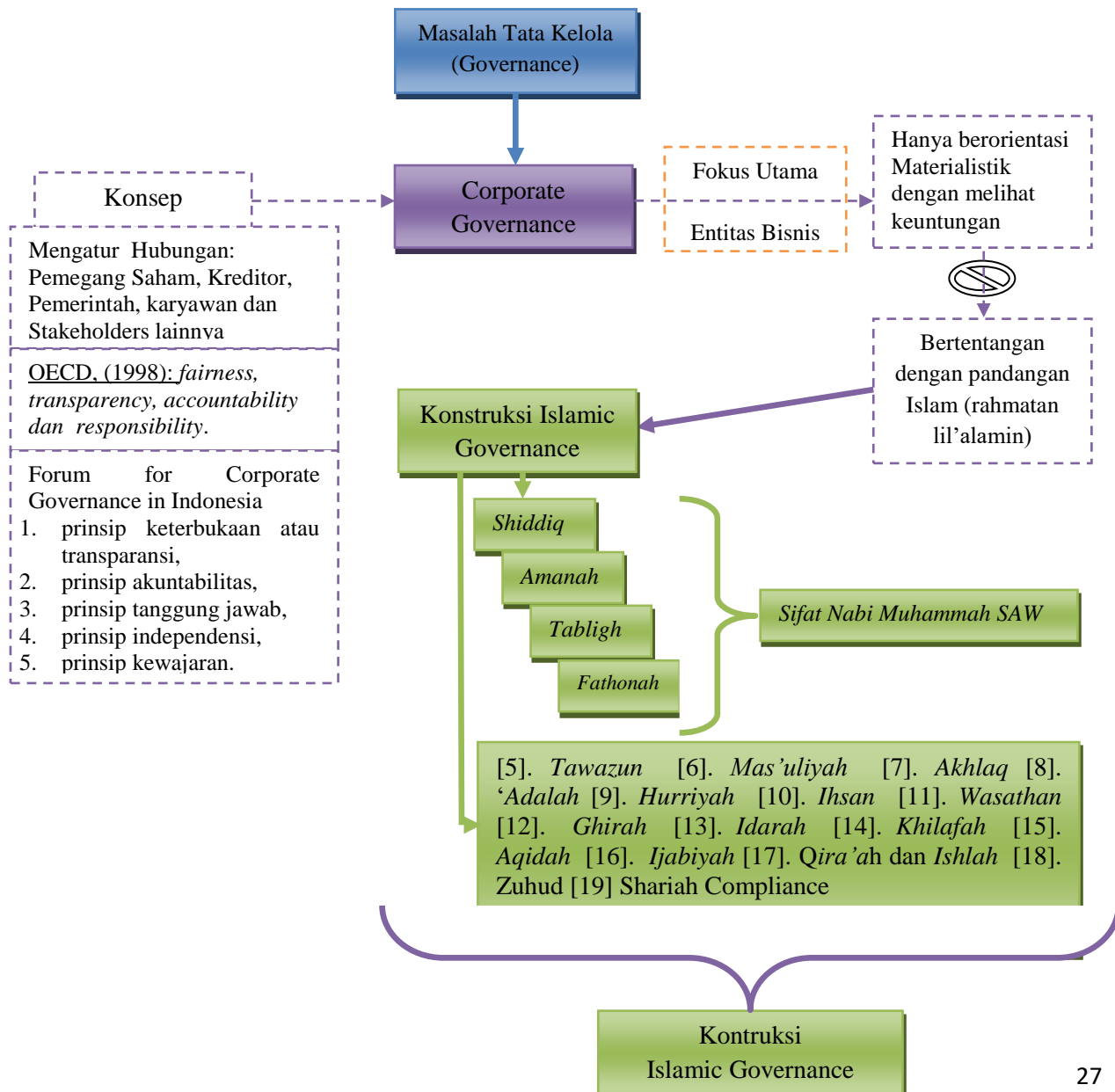
Nofianti, dkk (2012) menggali prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) *Syariah* dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafahul Ryashidin. Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia, ada beberapa prinsip yang dianggap penting bagi peneliti dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah*. Untuk menerapkan Islamic Governance pada perbankan syariah, tidak cukup hanya dengan prinsip *governance* yang dikemukakan untuk bank konvensional. Ada beberapa prinsip yang harus melekat pada usaha syariah.

## **2.5. Rerangka Berfikir**

Penerapan GCG di Indonesia diklasifikasikan bagi dua bentuk perusahaan, yaitu perusahaan konvensional dan perusahaan syariah (GGBS – *Good Governance Bisnis Syariah*). Indonesia merupakan bagian dari negara OECD, maka pedoman yang disusun oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) ini diharuskan untuk mengikuti rerangka OECD *Principle of CG*. Pedoman nasional GCG pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999, dan mendapatkan revisi pada tahun 2001 dan 2006. Sedangkan GGBS merupakan pedoman yang disusun secara mandiri di Indonesia. Telaah terhadap pedoman GCG dan GGBS perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman konsep CG yang berlaku di Indonesia.

Rerangka berfikir dalam mengkonstruksi *Islamic Governance* pada penelitian ini dimulai dari fokus utama entitas bisnis yang berorientasi materialistik dengan

melihat keuntungan, hal ini bertentangan dengan pandangan Islam yaitu untuk mencapai “rahmatan lil’alamiin”, seperti tampak pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.1. Rerangka Berpikir Kontruksi Islamic Governance**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran (*mixed methodology*). *Mixed Method* adalah metode yang memadukan pendekatan paradigma positif dan paradigma non positif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Tashakkori, 2010). *Mixed Method* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian.

Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah urutan analisis kuantitatif dan kualitatif, tujuan strategi ini adalah untuk mengidentifikasi komponen konsep (subkonsep) melalui analisis data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif guna memperluas informasi yang tersedia (Tashakkori, 2010). Intinya adalah untuk menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif agar memperoleh analisis yang lebih lengkap. *Mixed method* menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

Paradigma non positif dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif kritis dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan kritis. Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologi keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan pendekatan objektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Mereka ingin memahami kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati (Burrell dan Morgan. 1979).

Burrell dan Morgan (1979:20) menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Peranan sosial masyarakat, penelitian terikat kepada norma-norma, aturan-aturan tertentu dan keyakinan, serta pandangan dan sikap dari informan (Muhadjir 2000:12).

Penelitian ini juga menggunakan paradigma kritis. Asumsi dasar teori kritis adalah: 1) ilmu sosial tidak hanya memahami ketidakadilan suatu distribusi kekuasaan beserta distribusi resources, namun berupaya membantu menciptakan kesamaan dan emansipasi kehidupan, 2) pendekatan teori kritis memiliki keterikatan moral dalam rangka mengkritik *status quo* beserta membangun masyarakat yang lebih adil (Muhadjir, 2000:198; Tashakkori & Teddlie, 2010:122). Proses berpikir kritis ini menuntut untuk berpikir terbuka dalam mengumpulkan, menganalisa dan evaluasi terhadap informasi relevan untuk selanjutnya merumuskan pertanyaan yang terkait dengan masalah dan mengajukan ide-ide serta secara efektif berkomunikasi dengan pihak lain (Duron, Limbach, & Waugh, 2006).

Penelitian ini merupakan bentuk pengamatan pada perbankan syariah di Indonesia yang memiliki aset kelolaan tertinggi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengalaman individu dan dipengaruhi oleh lingkungan penelitian akuntansi interpretif (Creswell 2007:79). Pengalaman individu dalam penelitian ini adalah bahan keterangan mengenai pengalaman individu dalam meneliti (Bungin 2012:104).

Selain wawancara data diperoleh dari dokumentasi berupa laporan keuangan perbankan syariah.

Selanjutnya untuk menganalisis data serta memberikan pembobotan pada masing-masing indikator menggunakan Analisis Faktor dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM). Bagaimana keterhubungan dari masing-masing indikator dan kontrak yang dibangun pada model ini juga akan dianalisis secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan tersebut.

### **3.2.Tahapan Penelitian**

Beberapa aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini antara lain adalah:

#### **a. Identifikasi Permasalahan**

Tahap ini dilalui dengan melakukan serangkaian aktivitas meliputi tinjauan pustaka dan interview. Konsep dan pemahaman akan Islamic Governance dan berbagai isu yang berkaitan dengannya dipelajari untuk memperkuat pembangunan model. Berbagai sumber baik skala internasional maupun nasional yang telah diterapkan di lingkungan perbankan Indonesia dipelajari. Sumber diperoleh melalui jurnal, buku, aturan pemerintah dan artikel. Sebagai hasilnya, konseptual model penelitian didefinisikan.

Selanjutnya, guna memperkuat hasil pemikiran konseptual, interview dengan pakar (ahli) baik secara akademik maupun praktisi. Beberapa pakar diminta informasi dan pengetahuannya berkaitan dengan *Islamic Governance* khususnya perbankan syariah, antara lain Bapak Prof. Iwan Triwiyono dari Universitas Brawijaya sebagai pakar akuntansi syariah, Ibu Murniati Mukhlisin Phd, Ketua STEI Tazkia sebagai pakar ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta Bapak Sofyan, M.Ag sebagai pakar ke-Islaman dan syariah. Format pertanyaan dibuat mengarah kepada hasil tinjauan pustaka dan teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, hasil interview tersebut akan ditranskripsikan dengan menggunakan tabel kesimpulan (Matthew dan Michael, 1994), untuk memperoleh analisa lebih lanjut. Guna

memeriksa kembali hasil analisa tabel, proses *triangulasi* dan metode pengecekan ulang dilakukan.

b. Membangun Instrumen

Setelah diperoleh informasi dari informan, selanjutnya dirancang instrument dalam bentuk kuesioner. Kuesioner dirancang dengan tujuan untuk menyatukan perspektif ahli di bidang Islamic governance dalam mendefinisikan indikator pengukuran menggunakan Analisis Faktor dengan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM)

c. Pembangunan Model dan Validasi Indikator

Tahap ini menjelaskan proses pembangunan indikator yang diperoleh berdasarkan hasil analisa instrumen pada tahap sebelumnya. Disini indikator dan kontrak yang digunakan sebagai kunci kesuksesan dalam mengukur kinerja bank syariah dengan menggunakan model Islamic Governance didefinisikan secara lebih lengkap.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati.
- b. Wawancara Mendalam (*in depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/ obyek penelitian untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pertanyaan yang diajukan kepada obyek penelitian dipandu dengan *interview guide* dan pertanyaan tersebut bisa berkembang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman data yang ingin diperoleh.



- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

### **3.4. Validasi Data**

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong: 2004). *Triangulation* menurut Moleong (2004) dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Triangulasi Sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.
- b. Triangulasi Metode adalah metode dengan menggunakan dua strategi yaitu: (1) Pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi Peneliti adalah metode dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.
- d. Triangulasi Teori adalah metode ini dengan melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi model sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap pihak perbankan syariah dan nasabah perbankan syariah

Untuk pengujian indikator dalam penelitian menggunakan Analisis Faktor dengan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM). SEM merupakan suatu teknik analisis multivariate generasi kedua yang menggabungkan antara analisis

faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple laten variabel independen dengan multiple laten variabel dependen dengan banyak indikator. Keunggulan SEM dibanding model multivariat yang lain adalah SEM mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara teori dengan data penelitian (Latan, 2013).

Evaluasi model bertujuan untuk mengevaluasi model secara keseluruhan. *Goodness-of Fit* merupakan indikasi dari perbandingan antara model yang dispesifikasi dengan matrik kovarian antar indikator. Jika *goodness-of fit* yang dihasilkan baik, maka model tersebut dapat diterima sedangkan jika buruk model tersebut harus ditolak atau dilakukan modifikasi model (Latan, 2013). Beberapa ukuran fit model yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

*Goodness-of Fit* Model Pengukuran

| <i>Goodness of Fit Index</i>                             | Nilai Kesesuaian    |
|--|---------------------|
| <i>Chi-square</i>  | Diharapkan rendah   |
| <i>Probability Level</i>                                 | $\geq 0.05$         |
| <i>Degree of Freedom</i>                                 | Positif             |
| <i>The Minimum Sample Discrepancy Function – CMIN/DF</i> | $\leq 2.0/\leq 3.0$ |
| <i>Goodness of Fit Index (GFI)</i>                       | $\geq 0.90$         |
| <i>Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)</i>             | $\geq 0.90$         |
| <i>Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)</i>   | $\leq 0.08$         |

Sumber: Latan (2013)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Framework Pembangunan Teori Dasar Indikator Islamic Governance**

Pembangunan indikator *Islamic Governance* pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian teori dari penelitian-penelitian terdahulu, dan wawancara yang dilakukan dengan para pakar (*expert*) dari kalangan pakar Akuntansi Syariah, pakar perbankan syariah, yaitu Bapak Prof.Iwan Triwiyono dari Universitas Brawijaya sebagai pakar akuntansi syariah, Ibu Murniati Mukhlisin Phd, Ketua STEI Tazkia sebagai pakar ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta Bapak Sofyan, M.Ag sebagai pakar ke-Islaman dan syariah.

Berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan pakar, peneliti mencoba mengembangkan dimensi *Islamic Governance* sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Dimensi dan Indikator *Islamic Governance*

| No | Dimensi             | Indikator   |
|----|---------------------|---|
| 1  | Shiddiq (Kejujuran) | 1. Berbicara jujur<br>2. Tidak mengambil apapun yang bukan haknya |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Mengakui kesalahan sendiri</li> <li>4. Mengumumkan kepada karyawan tentang hak-haknya (Nurul Zuriyah)</li> </ul>   |
| 2 | Amanah<br>(Pemenuhan Kepercayaan)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dipercaya menjaga rahasia</li> <li>2. Menjaga kepercayaan dari orang lain</li> <li>3. Menepati Janji</li> <li>4. Menyampaikan pesan dengan baik</li> <li>5. Menjaga titipan seperti semula</li> <li>6. Menyelesaikan tugas tepat waktu</li> <li>7. Mengerjakan sesuatu sampai tuntas</li> <li>8. Melaksanakan sholat tepat waktu</li> <li>9. Melaksanakan ibadah sunnah secara rutin</li> <li>10. Memperhatikan kesejahteraan umat</li> <li>11. Tidak Menipu (dengan melakukan kebohongan-kebohongan publik)</li> <li>12. Patuh pada aturan</li> </ul> |
| 3 | Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen</li> <li>2. Kejelasan dan kelengkapan informasi</li> <li>3. Keterbukaan proses</li> <li>4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi</li> </ul>  |
| 4 | Fathonah (Kecerdasan)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecerdasan Intelektual</li> <li>2. Kecerdasan Emosional</li> <li>3. Kecerdasan Spiritual</li> </ul>  |
| 5 | Tawazun (Keseimbangan)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruhiah atau bisa disebut dengan kekuatan spritual</li> <li>2. Jasadiyah atau jasmani adalah sisi fisik dari pribadi manusia</li> <li>3. Fikriah atau pikiran adalah sisi dari pengetahuan dan wawasan manusia</li> </ul>   |
| 6 | Mas'uliyah (Akuntabilitas)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan</li> <li>2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Adanya output dan outcome yang terukur</li> </ul>  |
| 7 | Akhlaq (Moral dan Integritas)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan yang di perintahkan oleh ajaran Allah dan rasulullah SAW yang termuat dalam al-qur'an dan as-sunnah</li> <li>2. Perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat.</li> <li>3. Perbuatan yang meningkatkan martabat kehidupan manusia di mata Allah dan sesama manusia.</li> </ul>  |
| 8 | 'Adalah (Keadilan)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan distributif</li> <li>2. Keadilan prosedural</li> </ul>  |
| 9 | Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial</li> <li>2. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang</li> </ul>   |

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
|    | Bertanggung jawab)                 | berkenan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.<br>3. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview diluar batasbatas kewajaran dalam proses audit.   |
| 10 | Ihsan (Profesional)                | 1. Dedikasi pada profesi<br>2. Kewajiban sosial<br>3. Kemandirian dan hubungan dengan rekan seprofesi   |
| 11 | Wasathan (Kewajaran)               | 1. keseimbangan hak dan kewajiban,<br>2. keseimbangan tanggung jawab dan wewenang,<br>3. hak mendapat informasi, dan<br>4. tersedianya saluran menyampaikan pendapat  |
| 12 | Ghirah (Semangat)                  | 1. Memiliki semangat dalam mencapai tujuan bank syariah<br>2. Memiliki semangat untuk menjalankan kegiatan bank berdasarkan syariah<br>3. selalu memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan syariah<br>4. Pimpinan mengkondisikan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan<br>5. Memberikan penghargaan bagi karyawan dan nasabah |
| 13 | Idarah (Pengelolaan)               | 1. Menyusun perencanaan yang komprehensif untuk kelanjutan bisnis bank syariah<br>2. Menyusun struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kondisi dan lingkungan<br>3. Menempatkan SDM yang tepat<br>4. Mengkordinir karyawan sesuai deskripsi pekerjaan<br>5. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya bank syariah                      |
| 14 | Khilafah (Kepemimpinan)            | 1. Dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dikalangan karyawan dan nasabah<br>2. Memiliki pola pikir yang jauh kedepan<br>3. Peduli pada kemaslahatan umat<br>4. Selalu mengakomodir semua pendapat<br>5. Mendelegasikan tugas dan wewenang sesuai kepentingan   |
| 15 | Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan) | 1. Memiliki kepercayaan dan keyakinan hanya pada Allah SWT<br>2. tidak pernah berbuat syirik<br>3. mempercayai takdir baik dan buruk hanya dari Allah SWT   |
| 16 | Ijabiyah (Bertitik Positif)        | 1. Menganggap semua karyawan member kinerja terbaik<br>2. menanggapi dengan baik setiap masukan<br>3. Setiap kritikan disikapi positif<br>4. optimis pada setiap peluang yang ada   |
| 17 | Qira'ah (Organisasi Yang)          | 1. Mmemberikan kesempatan kepada karyawan mengikuti berbagai pelatihan dan workshop   |

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
|    | Terus Belajar)                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengikuti perkembangan ilmu untuk meningkatkan kapabilitas dirinya</li> <li>3. melakukan benchmarking dengan perusahaan lain yang lebih maju</li> <li>4. menjalin kerjasama untuk meningkatkan kapabilitas bank syariah</li> </ol>   |
| 18 | Islah (Selalu Melakukan Perbaikan) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengadopsi teknologi terkini agar dapat bersaing di pasaran</li> <li>2. belajar dari kesalahan yang pernah terjadi</li> <li>3. melakukan perbaikan secara kontinyu</li> </ol>  |
| 19 | Syariah Compliance                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada riba dalam transaksi bank</li> <li>2. Tidak ada gharar dalam transaksi bank</li> <li>3. . Tidak ada maisir dalam transaksi bank</li> <li>4. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal</li> <li>5. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah</li> <li>6. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i</li> </ol> |

Sumber: Ismail,Razak (2014), Bhatti (2009)

Beberapa prinsip yang dianggap penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah* pada perbankan syariah sebagai berikut:

1. Shiddiq (Kejujuran)

Shiddiq artinya benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Bahwa Rasulullah dalam perkataan dan perbuatannya seperti tertera dalam Surah An Najm 4-5 *“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”*

2. Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)

Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.” (Al A'raaf: 68.

3. *Tabligh* (Transparansi dan Keterbukaan)

Tabligh artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung.

4. *Fathonah* (Kecerdasan)

Fathonah artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur dan mengelola sesuatu.

5. Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun adalah keseimbangan dalam segala hal dan ini merupakan karakter dari ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

6. Mas'uliyah (Akuntabilitas)

Mas'uliyah adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip kepemimpinan.

7. Akhlaq (Moral dan Integritas)

Akhlaq atau moral merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik.

8. 'Adalah (Keadilan)

'Adalah merupakan keadilan dalam bersikap. Dari dasar mekanisme keuangan syari'ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

9. Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab)

Huriyyah adalah sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggungjawab.

10. Ihsan (Profesional)

Ihsan adalah kesempurnaan atau terbaik, profesional dalam menjalankan tugas.

11. Wasathan (Kewajaran)

Wasathan adalah kewajaran dalam segala hal.

12. Ghirah (Semangat)

Ghirah adalah semangat dalam membela yang benar.

13. Idarah (Pengelolaan)

Idarah adalah mampu mengelola semua hal dengan baik.

14. Khilafah (Kepemimpinan)

Khilafah adalah kepemimpinan dalam Islam, mampu memimpin secara keseluruhan.

15. Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan)

Aqidah adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh

16. Ijabiyah (Berfikir Positif)

Ijabiyah adalah berfikir positif dan tidak menganggap sesuatu hal menjadi tidak penting.

17. Qira'ah (Organisasi Yang Terus Belajar)

18. Ishlah (Selalu Melakukan Perbaikan)

19. Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh diantaranya adalah:

- a. Berdasarkan rerangka pemikiran, studi literatur dan wawancara dengan pakar, dapat dibangun konstruksi Islamic Governance dengan menggunakan dimensi-dimensi, yaitu *Shiddiq* (Kejujuran), *Amanah* (Pemenuhan Kepercayaan), *Tabligh* (Transparansi dan Keterbukaan), *Fathonah* (Kecerdasan), *Tawazun* (Keseimbangan), *Mas'uliyah* (Akuntabilitas), *Akhlaq* (Moral dan Integritas), *'Adalah* (Keadilan), *Hurriyah* (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab), *Ihsan* (Profesional), *Wasathan* (Kewajaran), *Ghirah* (Semangat), *Idarah* (Pengelolaan), *Khilafah* (Kepemimpinan), *Aqidah* (Kepercayaan dan Keyakinan), *Ijabiyah* (Berfikir Positif), *Qira'ah* (Organisasi Yang Terus Belajar), *Ishlah* (Selalu Melakukan Perbaikan) dan *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah).
- b. Semua indikator valid dalam mengukur variabel yang akan diteliti, tetapi untuk kesesuaian model sangat bervariasi. Variabel yang sangat valid pada penelitian ini adalah variable akhlak, hurriyah dan islah.

#### **5.2. Saran**

Saran ke depan pada penelitian ini dapat dikembangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Meneliti kondisi implementasi Islamic Governance tidak hanya di perbankan saja, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan syariah lainnya, baik di Indonesia atau di dunia.
2. Indikator ataupun variabel yang dihasilkan dapat lebih dikembangkan mengarah kepada aspek Islamic Governance yang tidak hanya berlaku untuk perbankan syariah namun juga perbankan konvensional

## DAFTAR PUSTAKA

- Archer, S., & Karim, R. A. A. (1997). *Agency theory, corporate governance, and the accounting regulation of Islamic banks. Research in Accounting Regulation*, Suppl. 1, 97 – 114.
- Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, (2009), *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles*, Critical Perspectives on Accounting 20 556–567.
- Bungin, H.M.B. 2012. “Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya”. Kedua. Prenada Media Group. Jakarta.
- Burrell, G dan Morgan, G. 1979. “*Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*”. Heinemann Educational Books. London.
- Cornelius, P., Cornelius, P. K., & Kogut, B. M. (Eds.). (2003). *Corporate governance and capital flows in a global economy*(Vol. 1). Global Outlook Book Series.
- Creswell, J.W. 2007. “*Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches*”. Second Edition. Sage Publications Inc. USA.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Ellstrand, A. E., & Johnson, J. L. (1998). Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance. *Strategic management journal*, 19(3), 269-290.
- Duron, R., Limbach, B., & Waugh, W. 2006. “*Critical Thinking Framework For Any Discipline. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*”, 17(2), 160–166. Retrieved from [http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE17\(2\).pdf#page=89](http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE17(2).pdf#page=89)
- Grant, Garry H., (2003), *The Evolution of Corporate Governance and Its Impact to Modern Corporate America*, Management Decisions, 41, 9, pp. 923-934
- Hermanson, D. R., & Rittenberg, L. E. (2003). Internal audit and organizational governance. *Research opportunities in internal auditing*, 1, 25-71.
- Leny Nofianti dkk (2012) “*Principles Of Good Corporate Governance Shari’a Model*”,ICIAF, Prossiding ICIAF World Academy of Science, Engineering

and Technology Issue 74 February 2013 Kuala Lumpur pISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778 Part VII

Lewis, M. K. and Algaud, L. M., (2001), *Islamic Banking*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Moleong, L. J. 2004. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, N. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Statistik Perbankan Indonesia

Osterloh, F. E., & Parkinson, B. A. (2011). Recent developments in solar water-splitting photocatalysis. *MRS bulletin*, 36(1), 17-22.

Osterloh, M., Frey, B. S., & Zeitoun, H. (2011). Corporate governance as an institution to overcome social dilemmas. In *Corporate governance and business ethics* (pp. 49-73). Springer, Dordrecht.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. 2010. “Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research” (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wagner III, J. A., Stimpert, J. L., & Fubara, E. I. (1998). Board composition and organizational performance: Two studies of insider/outsider effects. *Journal of Management studies*, 35(5), 655-677.